



**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

***THE EFFECT OF FISCAL DECENTRALIZATION ON HUMAN
DEVELOPMENT INDEX IN REGION/CITY OF SOUTH SULAWESI***

Bahrul Ulum Rusydi^{1*}, Citra Nurul Maulia², Hasbiullah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*e-mail: bahrul.rusydi@uin-alauddin.ac.id

Article History: Received: November 24, 2022; Revised: December 18, 2022; Accepted: December 19, 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2020. Variabel dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil sebagai variabel independent dan indeks pembangunan manusia sebagai variabel dependen. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan analisis data panel dengan metode *fixed effect model (FEM)*. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu data *time series* selama 8 tahun dan data *cross section* sebanyak 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi selatan. Dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi selatan. Dana bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi selatan. Namun secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata kunci: *PAD, Dana Perimbangan, Indeks Pembangunan Manusia, Sulawesi Selatan*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of fiscal decentralization on the human development index in the districts/cities of South Sulawesi Province in 2013-2020. The variables in this study are local revenue, general allocation funds, special allocation funds and profit-sharing funds as the independent variable and the human development index as the dependent variable. This study is a quantitative study using panel data analysis with the fixed effect model (FEM) method. The population and sample in this study are time series data for 8 years and cross section data of 24 districts/cities in South Sulawesi Province. The results obtained in this study indicate that local revenue and special allocation funds have a significant effect on the human development index in the districts/cities of South Sulawesi Province. The general allocation fund has no significant effect on the human development index in the districts/cities of South Sulawesi Province.



Revenue-sharing funds have a negative and significant effect on the human development index in the districts/cities of South Sulawesi Province. However, simultaneously local revenue, general allocation funds, special allocation funds and profit-sharing funds have a significant effect on the human development index in the districts/cities of South Sulawesi Province.

Keywords: *Regional Revenue, Transfer Fund, Human Development Index, South Sulawesi*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mulai hangat dibicarakan sejak bergulirnya era reformasi pasca runtuhnya tembok kekuasaan pemerintah orde baru. Sistem pemerintahan sentralisasi yang selama ini dianut pemerintahan presiden Soeharto dianggap tidak mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat luas, sehingga memunculkan tuntutan kewenangan yang lebih besar dari daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tuntutan ini kemudian melahirkan Undang-Undang Otonomi Daerah, yaitu UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sekaligus menjadi awal era baru desentralisasi fiskal di Indonesia (Safrianto, 2017).

Masyarakat diposisikan sebagai tujuan sekaligus pelaku ekonomi. Paradigma pembangunan menempatkan manusia sebagai fokus dan seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat), serta peningkatan pendidikan (kemampuan baca tulis dan lamanya waktu menempuh pendidikan formal) (Habibullah, 2017). Desentralisasi memiliki konsep yang terdiri dari tiga yaitu desentralisasi politik (*political decevtralization*), desentralisasi administratif (*administrative decentralization*), dan desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*), dimana kegiatannya harus berjalan beriringan dan dengan konsep yang jelas. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom. Daerah otonom dimaksudkan agar suatu daerah dapat berkembang sesuai kemampuannya sendiri dan meningkatkan potensinya agar tidak bergantung pada pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal sumber penerimaan yang di gunakan untuk pendanaan pemerintah daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi vertical (*center regional*) dan horizontal (*region-region*) imbalances antar daerah. Perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu

sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Sasana, 2006).

Salah satu wujud desentralisasi fiskal di Indonesia adalah berupa dana perimbangan yang diserahkan dan dilimpahkan wewenang penggunaannya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini memiliki empat komponen, yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil. Selain itu pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri besaran pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah serta laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengelolaan kekayaan daerah. Penggunaan anggaran penerimaan yang berasal dari dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah menjadi kewenangan daerah untuk mengalokasikannya demi kesejahteraan masyarakat di daerah yang dapat diukur dari berapa besar pertumbuhan per kapita di setiap daerah.

Masyarakat diposisikan sebagai tujuan sekaligus pelaku ekonomi. Paradigma pembangunan menempatkan manusia sebagai fokus dan seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat), serta peningkatan pendidikan (kemampuan baca tulis dan lamanya waktu menempuh pendidikan formal) (Habibullah, 2017).

Pembangunan manusia atau peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan pembangunan nasional. Melalui pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil, penekanan bahwa pentingnya sumber daya manusia dalam pembangunan menjadi suatu kebutuhan. Kualitas manusia pada suatu wilayah memiliki pengaruh besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan di wilayahnya, karena indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk melihat seberapa jauh tingkat kesejahteraan suatu daerah dalam sebuah pembangunan daerah.

Desentralisasi fiskal sendiri pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer pemerintah dalam bentuk dana perimbangan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Dengan adanya transfer dari pemerintah pusat, daerah dapat meningkatkan pembangunan terutama pembangunan sumber daya manusianya yang dimana jika pembangunan sumber daya manusia suatu daerah mengalami peningkatan maka nilai Indeks Pembangunan Manusia juga akan meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat pun akan terjamin. Berdasarkan hal tersebut, maka desentralisasi fiskal merupakan strategi kebijakan pemerintah yang sangat penting bagi pembangunan manusia terutama dalam keikut sertaannya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

BAHAN DAN METODE

Model Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk data panel yaitu gabungan data *time series* dari tahun 2013-2020 (8 tahun) dan data *cross section* sebanyak 24 kabupaten/kota yang meliputi data desentralisasi fiskal dan indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi selatan.

Sumber data berasal dari berbentuk laporan tahunan yang telah dipublikasikan oleh Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) dan data lainnya yang terkait dengan penelitian. Kerangka pikir dalam penelitian ini menjelaskan tentang hubungan antara variabel independent yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap variabel independent yaitu indeks pembangunan manusia. Dengan demikian, maka model dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- Y_{it} : Indeks Pembangunan Manusia di daerah i pada priode t
- X_{1it} : Pendapatan Asli Daerah di daerah i pada periode t
- X_{2it} : Dana Alokasi Umum di daerah i pada periode t
- X_{3it} : Dana Alokasi Khusus di daerah i pada periode t
- X_{4it} : Dana Bagi Hasil di daerah i pada periode t
- i : *cross section*
- t : *time series*
- β_0 : Intersep atau konstanta
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$: Koefisien regresi variabel Independen
- ε : *error term*

Metode Estimasi Data Panel

a. Common Effect Model (CEM)

Common Effect Model (CEM) atau *pooled least square* merupakan salah satu pendekatan yang paling sederhana. Model ini tidak memperhatikan adanya perbedaan karakteristik dalam *cross section* dan *time series* dalam persamaanya dapat ditulis sebagai berikut:

b. Fixed Effect Model (FEM)

Model ini memiliki dugaan bahwa perbedaan antar individu dapat dilihat dari perbedaan intersepanya. Teknik *variable dummy* diperlukan untuk memudahkan estimasi, yang memiliki intersep berbeda antar individu.

c. Random Effect Model

Keuntungan menggunakan model Random ini yakni bisa menghilangkan heteroskedastisitas. Dalam persamaanya ditulis sebagai berikut:

Uji Ketepatan Model

Dalam penentuan model yang akan digunakan, maka dilakukan beberapa uji untuk pemilihan yang dibutuhkan metode pendekatan estimasi yang sesuai serta memiliki nilai regresi yang baik.

a. Uji Chow

Uji Chow merupakan pengujian untuk menentukan suatu model apakah lebih baik Fixed Effect Model atau Common Effect Model. Berikut merupakan hipotesa dari Uji Chow:

H0: Apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka model yang paling baik yaitu *Common Effect Model*

H1: Apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka model yang paling baik yaitu *Fixed Effect Model*

Dasar penolakan terhadap hipotesis di atas ialah dengan cara membandingkan probabilitas F-statistic dengan nilai α ($\alpha=0,05$). Apabila probabilitas F-statistic lebih besar dari nilai alpha maka H0 diterima dan H1 ditolak maka model yang paling baik adalah *Common Effect Model*.

b. Uji Hausman

Pada Uji Hausman model tadi diuji kembali membandingkan probabilitasnya dengan *Random Effect Model*. Sehingga berikut adalah hipotesis dari Hausman:

H0: Apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka model yang paling baik yaitu *Random Effect Model*.

H1: Apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka model yang paling baik yaitu *Fixed Effect Model*.

Keputusan yang diambil berdasarkan perbandingan antara nilai probabilitas Uji Hausman dengan nilai alpha ($\alpha= 0,05$). Apabila nilai probabilitas Uji Hausman lebih besar dari nilai alpha maka H0 diterima dan menolak H1 yang artinya metode regresi yang paling baik adalah *Random Effect Model*.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan mendapatkan model yang benar diperoleh dari asumsi dasar analisis data panel, dengan kata lain model yang digunakan harus menghindari penyimpangan hipotesis klasik. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, multikolenieritas, heterokedastisitas dan autokorelasi.

Uji Hipotesis

Untuk mengetahui tingkat signifikansi masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen dapat digunakan pengujian statistik yang meliputi analisis statistic R^2 (koefisien determinasi), uji simultan (uji F) dan uji persial (uji T).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Ketepatan Model

Uji hausman dilakukan untuk mengetahui model estimasi yang lebih baik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Mode*.

Tabel 1. Hasil uji hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	28.305711	4	0.0000

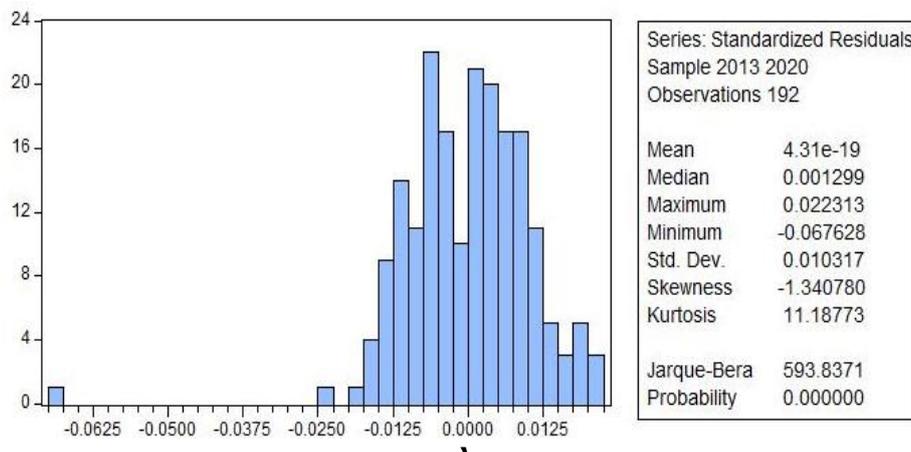
Sumber: Hasil olah data sekunder, Tahun 2022

Berdasarkan hasil uji hausman diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas menunjukkan hasil 0,0000 yang dimana $0,0000 < 0,05$ sehingga probabilitas menolak H_0 dan menerima H_1 . Maka uji hausman menunjukkan model lebih baik digunakan ialah *Fixed Effect Model*.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi yang diuji, yaitu variable independen dan variable dependen berdistribusi normal atau tidak.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Hasil olah data sekunder, Tahun 2022

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas maka diperoleh nilai Prob. JarqueBerra sebesar 0,0000, jadi dapat disimpulkan bahwa $0,0000 < 0,05$. Berdasarkan uji tersebut maka dapat diketahui bahwa data tidak berdistribusi secara normal. Hal ini dapat terjadi karena data yang di teliti bervariasi, terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota selama 8 tahun sehingga ada 192 observasi. Berdasarkan realita tersebut maka tidak menutup kemungkinan terjadi distribusi yang tidak normal. Hal ini didukung oleh teorema limit pusat (*Central Limit Theorem*), yang menjelaskan bahwa penelitian yang memiliki jumlah observasi lebih dari 30, maka asumsi normalitas dapat diabaikan.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi yang di uji di temukan korelasi antara variable bebas (independent). Model regresi dapat disebut baik apabila tidak terjadi korelasi antara variable bebas, jika antara variable bebas terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinearitas.

Tabel 2. Hasil uji multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.82E+09	3014.745	NA
LNx1	1889590.	1073.695	1.810568
LNx2	2453454.	1662.986	1.052552
LNx3	1924560.	1140.838	1.563736
LNx4	2435610.	1167.651	1.396177

Sumber: Hasil olah data sekunder, Tahun 2022

Berdasarkan hasil uji multikoleniaritas di atas tidak ditemukan adanya keterkaitan antar variabel independent, dilihat dari nilai VIF < 10,00 yang artinya model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari multikoleniaritas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi yang diuji terdapat ketidaksamaan varian dan residual pengamatan yang lainnya.

Tabel 3. Hasil uji heterokedastisitas

F-statistic	0.940708	Prob. F(14,177)	0.5165
Obs*R-squared	13.29666	Prob. Chi-Square(14)	0.5033
Scaled explained SS	5.112722	Prob. Chi-Square(14)	0.9842

Sumber: Hasil olah data sekunder, Tahun 2022

Hasil uji heterokedastisitas menggunakan test white pada table diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas *chi-square* lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak terdapat heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear apakah ada tidaknya korelasi antara variable pengganggu pada preiode tertentu dengan variable sebelumnya. Dasar pengambilan keputusan adalah jika Durbin Watson berada pada daerah dU hingga 4-dU disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung autokorelasi.

Tabel 4. Hasil uji autokorelasi

F-statistic	2.267214	Prob. F(2,185)	0.1065
Obs*R-squared	4.593415	Prob. Chi-Square(2)	0.1006

Sumber: Hasil olah data sekunder, Tahun 2022

Berdasarkan Berdasarkan hasil uji autokorelasi di atas diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,1006 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji Simultan (Uji-F)

Untuk menguji apakah variabel dependen berpengaruh secara simultan terhadap variabel independent, maka dilakukan uji F dengan melihat probabilitas dan F-statistic.

Tabel 5. Hasil uji simultan

R-squared	0.971814	Mean dependent var	4.227619
Adjusted R-squared	0.967173	S.D. dependent var	0.061454
S.E. of regression	0.011134	Akaike info criterion	-6.023531
Sum squared resid	0.020332	Schwarz criterion	-5.548480
Log likelihood	606.2590	Hannan-Quinn criter.	-5.831132
F-statistic	209.4226	Durbin-Watson stat	1.415801
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil olah data sekunder, Tahun 2022

Hasil regresi pada model Fixed Effect Model menunjukkan bahwa nilai probabilitas (F-statistik) yaitu sebesar $0,000000 < 0,05$ maka model berpengaruh secara signifikan. Hal ini memperlihatkan bahwa secara simultan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Uji Parsial (Uji-T)

Uji T dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari masing-masing variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), Dana Alokasi Khusus (X_3) terhadap variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (Y).

Tabel 6. Hasil uji parsial

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.
X1	0.024222	8.188316	0
X2	0.000488	0.282387	0.778
X3	0.008876	4.802318	0
X4	-0.0103	-3.54983	5E-04
C	3.777305	45.65949	0

Sumber: Hasil olah data sekunder, Tahun 2022

Adapun pengaruh dari masing-masing variabel independent terhadap Indeks Pembangunan Manusia:

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode *Fixed effect model*, maka dapat diketahui bahwa *t-statistik* pada variabel Pendapatan Asli Daerah senilai 8,188316 dengan *prob t-statistik* $0,0000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode *Fixed effect model*, maka dapat diketahui bahwa *t-statistik* pada variabel Dana Alokasi Umum senilai 0,282387 dengan *prob t-statistik* $0,7780 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa

Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sehingga hipotesis dalam penelitian ini ditolak.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode *Fixed effect model*, maka dapat diketahui bahwa *t-statistik* pada variabel Dana Alokasi Khusus senilai 4,802318 dengan *prob t-statistik* 0,0000 > 0,05 yang menunjukkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sehingga hipotesis dalam penelitian ini ditolak.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode *Fixed effect model*, maka dapat diketahui bahwa *t-statistik* pada variabel Dana Bagi Hasil senilai -3,549832 dengan *prob t-statistik* 0,0005 < 0,05 yang menunjukkan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sehingga hipotesis dalam penelitian ini ditolak.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (*R-squared*) merupakan koefisien dimana koefisien tersebut menunjukkan seberapa besar variabel-variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Hasil uji koefisien determinasi

R-squared	0.971814	Mean dependent var	4.227619
Adjusted R-squared	0.967173	S.D. dependent var	0.061454
S.E. of regression	0.011134	Akaike info criterion	-6.023531
Sum squared resid	0.020332	Schwarz criterion	-5.548480
Log likelihood	606.2590	Hannan-Quinn criter.	-5.831132
F-statistic	209.4226	Durbin-Watson stat	1.415801
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil olah data sekunder, Tahun 2022

Berdasarkan tabel uji determinasi menunjukkan nilai koefisien determinasi (*R-squared*) sebesar 0,971814 maka hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel independent memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar 97%.

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hipotesis pertama (H_1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi Sulawesi Selatan. Pada analisis *fixed effect model* nilai *probability* sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai *t-statistik* sebesar 8,188316. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah relative terhadap total pendapatan, maka semakin baik indeks pembangunan manusia suatu daerah. Hal tersebut membuktikan bahwa tiap wilayah wajib menelusuri kapasitas masing-masing wilayahnya karena ukuran pencapaian desentralisasi ialah seberapa besar ketergantungan wilayah pada pemerintah pusat. Selain itu dengan besarnya sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak, pendapatan tersebut dapat digunakan untuk keperluan belanja pemerintah daerah sebagai pendukung kegiatan pembangunan di daerahnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini

sejalan dengan teori menurut Soeratno dalam Purwadinata (2010) bahwa pendapatan asli daerah salah satu sumber pendapatan yang cukup diandalkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, karena dana ini murni digali sendiri dan dapat digunakan sepenuhnya untuk dimanfaatkan sesuai prioritas daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anim Rahmayanti, dkk (2018) dan Rezha Hanantoko (2020) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pendapatan asli daerah maka indeks pembangunan manusia juga akan ikut meningkat.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hipotesis kedua (H_2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi Sulawesi Selatan. Pada analisis *fixed effect model* nilai *probability* sebesar 0,7780 lebih besar dari 0,05 dengan nilai t-statistik sebesar 0,282387. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Ditinjau dari teori dana alokasi umum yang bersifat *block grand* yang berarti pengalokasiannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Tidak adanya pengaruh dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia disebabkan karena pengalokasian dana alokasi umum lebih difokuskan pada tujuan lain seperti meningkatkan kualitas perekonomian daerah tersebut. Jika dilihat secara individu, dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan ketimpangan fiskal daerah, sehingga daerah yang memiliki pendapatan asli daerah rendah masih sangat bergantung kepada dana alokasi umum untuk membiayai belanja pegawai. Besarnya dana alokasi umum yang diterima oleh daerah juga menunjukkan bahwa masih belum mampunya daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Jika pengalokasian dana alokasi umum lebih difokuskan untuk belanja modal maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mudrika Alamsyah Hasan, dkk (2018) dan Yuli Widya Stuti (2020) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, yang berarti setiap dana alokasi umum yang bersumber dari APBN dapat dimanfaatkan dengan baik oleh daerah sehingga semakin besar dana alokasi umum mengalami kenaikan maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

3. Pengaruh Dana Alokasi khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hipotesis ketiga (H_3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi Sulawesi Selatan. Pada analisis *fixed effect model* nilai *probability* sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai t-statistik sebesar 4,802318. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Dana alokasi khusus dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu khususnya untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu. Dana alokasi khusus sepenuhnya digunakan untuk penggunaan fasilitas publik. Jika dilihat pengeluaran-pengeluaran yang diperuntukkan dari dana alokasi khusus, pengeluaran tersebut sebagian besar merupakan pengeluaran yang dialokasikan pada belanja modal. Dana alokasi khusus yang diperoleh oleh pemerintah ternyata mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia dengan pengalokasian belanja modal di daerah tersebut. Ini menjadi indikasi bahwa pemerintah memanfaatkan dana alokasi khusus yang telah dialokasikan melalui belanja modal secara efektif. Oleh sebab itu dana bagi hasil sangat berpengaruh pada peningkatan belanja modal guna meningkatkan pelayanan publik di daerah tersebut. Oleh karena itu penggunaan dana alokasi khusus dalam alokasi belanja modal secara optimal akan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia, baik dibidang Pendidikan, Kesehatan, social, maupun pelayanan umum.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lily Syarifa, dkk (2020) dan Jualiana, dkk (2019) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Artinya dengan penggunaan dana alokasi khusus yang dapat disesuaikan dengan prioritas daerah maka kenaikan dana alokasi khusus akan menyebabkan kenaikan indeks pembangunan manusia.

4. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hipotesis keempat (H_4) yang diajukan dalam penelitian ini adalah dana bagi hasil berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi Sulawesi Selatan. Pada analisis *fixed effect model* nilai *probability* sebesar 0,0005 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai t-statistik sebesar -3,549832. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Hal ini disebabkan karena dana bagi hasil merupakan dana yang berasal dari pusat, yang mana pengalokasian dan bagi hasil diserahkan kepada pemerintah daerah. Namun terdapat beberapa komponen yang penggunaannya ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak leluasa dalam hal penggunaan dana bagi hasil untuk kesejahteraan masyarakat yang akan menyebabkan pengalokasian dana bagi hasil kurang berdampak secara signifikan pada indeks pembangunan manusia. Peningkatan dana bagi hasil seharusnya berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana bagi hasil untuk mendanai kebutuhan masyarakat melalui alokasi belanja modal demi menunjang sarana dan prasarana publik yang dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Martin Tamoro Siburian, dkk (2021) dan Yuly Widyastuti (2020) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dana bagi hasil tidak dapat berkontribusi dengan baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dengan meningkatnya dana bagi hasil maka akan mengakibatkan menurunnya indeks pembangunan manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka kesimpulan dari penelitian ini diantaranya; Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi Sulawesi Selatan. Dana alokasi umum berpengaruh tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi Sulawesi Selatan. Dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi Sulawesi Selatan. Dana bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Ananda, C. F. (2017). *Pembangunan ekonomi daerah dinamika dan strategi pembangunan*. UB Press.
- (2) Andriansyah, Y. (2017). *Menuju Desentralisasi Kebijakan Ekonomi Dalam Islam: Pengalaman Dinasti 'Usmaniyyah Abad 16-18 M dan Indonesia di Masa Orde Baru*. 9(1).
- (3) BPS. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia 2020* (Jakarta). BPS.
- (4) BPS. (2021). *No Title*. <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>
- (5) Fadhly, Z. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat*, 1(1), 1–15.
- (6) Febrizal, W. (2020). *Pengaruh Islamic Human Development Index Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur*.
- (7) Fendri, A. (2021). *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah - Rajawali Pers*. PT. Raja Grafindo Persada.
- (8) Habibullah, F. N. G. (2017). *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20011-2015*. 87(1,2), 149–200.
- (9) Halim, C. (2020). *Analisis Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal , Rasio Ketergantungan , Dan Rasio Kemandirian Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Timur Oleh : Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.

- (10) Handayani, H. (2020). *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia (Studi empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018)*.
- (11) Harahap, R. U. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab/Kota Propinsi Sumatra Utara. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*.
- (12) Hobrouw, Y. A., Suaryana, I. G. N. A., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Journal Akuntansi Universitas Cenderawasih*, 31(2), 401–413.
- (13) Kariangan, H. (2013). *Politik hukum dalam pengelolaan keuangan daerah*. Kencana Prenada Media Group.
- (14) Lestari, P., Sarfiah, S. N., & Prasetyanto, P. K. (2016). *Analisis Pengaruh DAU, DAK, dan DBH Terhadap IPM di Kbaupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tahun 2012-2016*. 1, 100–113.
- (15) Mahendra, P. G., & Agung, P. G. K. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 11(3), 863–877.
- (16) Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (kedua). Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Munfarida, S., & Priyojadmiko, E. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Rasio Efektivitas dan Rasio Kemandirian Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *AMAR (Andalas Management Review)*, 4(2), 46–59. <https://doi.org/10.25077/amar.4.2.46-59.2020>
- (17) Patadang, T. M., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Minahasa Tenggara Dengan Pengeluaran Di Bidang Kesehatan Sebagai Variabel Intervening*. 22(2), 132–149.
- (18) Riviando, A., Agustin, H., & Halmawati, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.52>
- (19) Rusmita, S. (2019). Desentralisasi Fiskal Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Akutansi*.
- (20) Sabilla, K., & Jaya, W. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional Di Indonesia. *JESP: Jurnal*

Ekonomi & Studi Pembangunan, 15(1), 12–22.
<https://doi.org/10.18196/jesp.15.1.1233>

- (21) Safrianto, Y. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(2), 60–67.
- (22) Sahara, N. A. A. (2020). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sebagai Variabel Intervening (Studi di Sumatera Bagian Selatan Tahun 2013-2018)*.
- (23) Sasana, H. (2006). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Dinamika Pembangunan*, 3(2), 145–170.
- (24) Sinuraya, R. E. M. (2020). *Pembangunan Manusia (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun Pembangunan Manusia*.
- (25) Sudaryo, Y., Sjarif, D., Sofianti, N. A., & Bandung, S. I. (2021). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Andi Publiser.
- (26) Taqwa, D. F., Priyono, H. T., & Santosa, H. S. (2016). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan dan Kesenjangan Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014 (The Influence of Fiscal Decentralization on Growth and Disparity in East Java Province at 2010-2014)*.
- (27) Udayana, E. A. U. (2018). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, dan Investasi Swasta Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 2458–2482.
<https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i03.p30>
- (28) Widyaismwanto, D. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia*.
- (29) Wulansari, F. D. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017*.